

## POTRET PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK DI SULAWESI TENGAH

Andi Asnudin\*

### *Abstract*

*Electronic procurement is expected to be done in an efficient and effective, transparent, accountable and provide equal opportunities for all contractors to be the winning bidder.*

*Descriptive analysis method used in this study, by using contractors who attended the auction on LPSE UNTAD as respondents.*

*The results showed that various problems faced by portrait contractors, among others: the ability of the limited human resources, hardware and software readiness is low, poor data base systems, supporting data is incomplete.*

*The resulting recommendations, among others, (1) an increase in capacity building to all relevant parties, (2) the availability of infrastructure to support electronic procurement system, and (3) allow all parties can access the documents to see the complete contractors that has been in an effort to load up the procurement process transparent and competitive so as to provide equal opportunities for contractors (4) continuously shaped discussion forum involving all stakeholders.*

**Keywords:** *Electronic, procurement contract*

### 1. Pendahuluan

Proses pelelangan (procurement process) yang efektif dan efisien, kompetitif, *accountable* dan transparan menjadi keinginan semua pihak dengan harapan penyedia jasa mempunyai kesempatan dan peluang untuk dapat bersaing secara luas yang tidak hanya menguntungkan sekelompok penyedia jasa dan pengguna jasa (owner). Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi tentang pengadaan barang/jasa dan telah memberlakukan regulasi tentang sistem pelelangan secara elektronik yang bertujuan untuk (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (3) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (4) mendukung proses monitoring dan audit; dan (5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dengan sistem pengadaan secara elektronik tentunya berbagai faktor menjadi kebutuhan penyedia jasa maupun pengguna jasa untuk implementasi pada sistem tersebut, antara lain: kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan hardware dan software, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Pengadaan sistem layanan elektronik di Sulawesi Tengah umumnya telah menggunakan sistem pelelangan secara elektronik untuk proyek yang sumber pembiayaan dari APBN dan APBD di setiap kabupaten dan kota. Untuk itu, dibutuhkan telaah tentang implementasi layanan sistem pengadaan secara elektronik di Sulawesi Tengah.

### 2. Kajian Literatur

#### 2.1 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

- a Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) untuk fungsi enkripsi dokumen
- b Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit BPKP.

---

\* Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan PERPRES No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

## 2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing* (LKPP, 2010):

- a *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

## 2.3 Implementasi LPSE

LPSE setiap tahunnya mengalami peningkatan implementasi, yang tentunya semakin tinggi tuntutan tingkat layanan, seperti (1) kemudahan akses informasi, (2) kecepatan proses *upload* dan *download* dokumen pelelangan, (3) penyempurnaan aplikasi pada sistem LPSE, (4) update data dan informasi setiap saat.

Tabel 1. Progress Implementasi LPSE 2008 - 2012

Deskripsi	2008	2009	2010	2011	2012
LPSE Sistem Provider	11	30	98	273	478
LPSE Service Provider	0	3	39	42	37
LPSE	11	33	137	315	515
Provinsi Terlayani	9	18	28	31	33
Instansi Terlayani	11	41	254	613	731

Sumber: LKPP, 2012

Tabel 2. Status Transaksi LPSE 2008 – 2012

Deskripsi	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Jumlah Lelang	33	1.724	6.397	24.475	85.229	117.928
Nilai Pagu ( Rp. Juta)	52.500	3.372.032	13.424.756	53.286.540	142.048.082	212.183.910
Jumlah Lelang Selesai	33	1.720	6.370	24.076	73.449	105.648
Nilai Pagu Selesai (Rp. Juta)	42.898	3.137.595	12.971.803	38.163.399	111.151.374	165.467.069
Hasil Nilai Lelang (Rp. Juta)	36.286	2.618.650	11.585.138	33.688.791	98.733.810	146.662.675
Jumlah PPK	101	366	1.738	1.947	4.178	8.330

Sumber: LKPP, 2012

Implementasi LPSE dari tahun 2008 s/d 2012 (tabel 1 dan tabel 2) menunjukkan bahwa 33 provinsi yang telah terlayani dengan jumlah instansi terlayani 731 dan jumlah lelang yang selesai sekitar 105.648 paket dan total anggaran sejumlah Rp. 146.662.675.000.000,00. Dengan kondisi tersebut, LKPP semakin dituntut untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) pada semua pihak yang terkait, serta pembinaan terhadap LPSE yang telah terbentuk di setiap provinsi, dan kabupaten kota.

#### 2.4 Dampak positif LPSE

Sistem layanan elektronik tentunya memberikan dampak positif bagi penyedia jasa, antara lain: (1) efisiensi biaya dan waktu, seperti tidak dibutuhkan lagi penggandaan dokumen, (2) pemasukan penawaran dapat dilakukan setiap saat sampai pada batas waktu pemasukan penawaran, dan (3) proses pelelangan dilakukan secara transparan dan memberikan akses informasi bagi semua pihak, (4) ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kertas, penghematan energi, (5) kemudahan akses informasi sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi penyedia jasa untuk mengikuti proses pelelangan dimana saja.

#### 2.5 Standar Minimal LPSE

Selama ini untuk membentuk LPSE, LKPP belum pernah menerapkan standar minimal infrastruktur yang digunakan, seperti server yang dipakai, sehingga setiap daerah memiliki server yang beragam baik dari merk maupun spesifikasi. Bagi pengelola LPSE yang tahu mengenai informasi teknologi (IT) mungkin akan mudah dalam memilih server tapi bagi yang tidak tahu mengenai IT akan sulit.

#### 2.6 Penyedia Jasa Konstruksi

Kontraktor adalah pihak yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik proyek (*project owner*) dengan penyedia jasa (kontraktor).

Edmonds mendefinisikan kontraktor adalah sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik yang dituangkan dalam persetujuan kontrak.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan (Sugiyono,1999). Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris (Suriasumantri,1978). Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

#### 3.1 Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyedia jasa konstruksi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang pernah mengikuti proses pelelangan di LPSE Universitas Tadulako dengan menggunakan sampel 20% dari 97 penyedia jasa sebagai jumlah populasi yang ada. Pada umumnya, untuk penelitian dengan metode analisa kualitatif deskriptif digunakan sekitar 15 s/d 30% sampel dari total populasi (Asnudin, 2004).

#### 3.2 Analisa data

Metode analisis kualitatif digunakan apabila data primer dan sekunder yang diperoleh berupa kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono,1999). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dan hasil jawaban responden terhadap kuesioner, serta wawancara terstruktur dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan dan berbagai regulasi yang digunakan dalam pengelolaan jasa konstruksi yang diolah dengan metode analisis kualitatif.

Analisis data dengan pendekatan kualitatif terdiri atas tiga proses kegiatan yaitu: reduksi data, tampilan (*display data*) dan penulisan kesimpulan. Analisis kualitatif dalam penelitian tentang Potret Pengadaan Barang/Jasa Sistem Elektronik di Sulawesi Tengah dilakukan dengan cara berikut ini:

- (1) Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara, jawaban atas kuesioner, dan dokumen-dokumen yang dianalisis lalu membuat catatan-catatan atas data tersebut. Selain catatan, data juga dibuat menjadi ringkasan data (*summary*), dan menyajikan

tampilan data dengan bentuk teks naratif, tabel dan grafik.

- (2) Kemudian data hasil survey dianalisis dan didiskusikan. Hasil dari analisis dan diskusi adalah memberikan gambaran dalam bentuk teks naratif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan registrasi Badan Usaha serta registrasi sertifikasi keterampilan maupun keahlian.

#### 4. Potret Penyedia Jasa Konstruksi Dengan Aplikasi LPSE Universitas Tadulako

Sejak dikeluarkan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2003 melalui Keppres No. 80 tentang Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara elektronik telah dapat digunakan untuk pelelangan barang dan jasa.

Pada tahun 2011 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Tadulako (LPSE UNTAD) telah melakukan pelelangan secara elektronik untuk beberapa paket pekerjaan.

Kemudian pada tahun anggaran 2012 LPSE UNTAD telah melakukan 33 paket lelang secara elektronik dengan anggaran sekitar Rp. 186.405.902.000,00 (tabel 3).

Pada tahapan awal pelelangan (mendaftar) di setiap kegiatan pelelangan di LPSE UNTAD rata-rata sekitar 26 penyedia jasa, akan tetapi jumlahnya yang memasukkan dokumen penawaran jumlah hanya sekitar 3 sampai dengan 4 penyedia jasa (gambar 1). Total jumlah penyedia jasa yang mendaftar sekitar 97 penyedia jasa dari 33 paket lelang.

Tabel 3. Status Implementasi LPSE

416	LPSE Provinsi Sulawesi Tengah	640	Provinsi Sulawesi Tengah	148	134.956.961.341	44	94.919.236.000
417	LPSE Kabupaten Banggai	641	Kabupaten Banggai	52	47.737.500.000	0	0
418	LPSE Kabupaten Donggala	642	Kabupaten Donggala	21	28.626.763.200	2	15.000.000.000
419	LPSE Kabupaten Morowali	643	Kabupaten Morowali	0	0	0	0
420	LPSE Kabupaten Parigi Moutong	644	Kabupaten Parigi Moutong	10	17.340.805.000	0	0
421	LPSE Kabupaten Sigi	645	Kabupaten Sigi	32	24.083.301.099	0	0
422	LPSE Kabupaten Tojo Una una	646	Kabupaten Tojo Unauna	57	70.614.618.000	0	0
423	LPSE Kabupaten Toli Toli*	647	Kabupaten Toli Toli	8	5.301.900.000	0	0
424	LPSE Kota Palu	648	Kota Palu	79	28.605.959.000	0	0
425	LPSE Universitas Tadulako	649	Universitas Tadulako	33	186.405.902.000	0	0

Potret proses pengadaan barang/jasa secara elektronik khususnya di LPSE UNTAD Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut.

a. Permasalahan terkait Sarana Manajemen

Permasalahan yang dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi terkait dengan sarana manajemen yang meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) data base, (3) perangkat keras (*hardware*), dan (4) perangkat lunak/aplikasi (*software*), serta (5) data penunjang.

(1) Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat rendah yang ada pada penyedia jasa, seperti penguasaan penggunaan IT. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain penyedia jasa umumnya melakukan pelibatan tenaga ahli maupun tenaga terampil pada pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas dan untuk usaha jasa konstruksi yang masuk kategori skala kecil dan menengah dominan tidak melibatkan tenaga ahli dalam pengendalian perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Kecenderungan penyedia jasa dalam pelibatan tenaga ahli dalam bentuk part time atau pada saat pelaksanaan pekerjaan saja (sesuai periode kontrak pelaksanaan pekerjaan). Hal tersebut, menunjukkan bahwa (1) pengelolaan usaha tidak dilakukan secara optimal, (2) peningkatan kapasitas (*capacity building*) tenaga kerja tidak berjalan.

Kemudian dalam pengendalian usaha dominan dijalankan dalam lingkungan keluarga.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum kondisi perusahaan jasa konstruksi skala kecil di Indonesia masih lemah, terutama dalam hal manajemen yang tidak efisien, keterbatasan kemampuan finansial dan teknologi, serta kurangnya kualitas SDM. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurangnya akses pada informasi dan permodalan (Asnudin, 2005).

(2) Data Base

Layanan pengadaan secara elektronik adalah suatu sistem aplikasi yang membutuhkan semua dokumen penawaran dalam bentuk

*hardcopy* dijadikan dalam bentuk *softcopy* atau data digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya penyedia jasa konstruksi memiliki kelemahan pada sistem data base yang berbasis *softcopy*. Dimana penyedia jasa seringkali tidak menyiapkan dokumen dalam bentuk data digital/*softcopy*, sehingga pada saat dibutuhkan atau *upload* dokumen penawaran timbul beberapa permasalahan, antara lain: (1) menghasilkan sistem manajemen file dokumen yang buruk, (2) beberapa file dokumen terlewatkan pada saat *upload* dokumen pelelangan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam lembar dokumen lelang (LDK). Tentunya hal tersebut, menyebabkan gagalnya penyedia jasa konstruksi (kontraktor) dalam proses pelelangan yang diikuti.

Dokumen yang dipersyaratkan pada LDK yang sering terlewatkan pada saat *upload* dokumen pelelangan penyedia jasa, antara lain: (1) akte perusahaan, (2) laporan pajak bulanan dan tahunan, (3) data tenaga ahli dan peralatan, (4) pengalaman perusahaan, (5) izin usaha (SBU, SIUP) yang ditentukan. Ketidaklengkapan dokumen tersebut, yang menggugurkan penyedia jasa dalam tahapan pelelangan.

(3) Software

Beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan aplikasi, seperti sebagai berikut: (1) setiap saat dilakukan penyempurnaan dan pengembangan, (2) penggunaan aplikasi tersebut belum sepenuhnya dikuasai oleh beberapa penyedia jasa, (3) tidak memberikan akses kepada penyedia jasa untuk melihat kelengkapan dokumen administrasi penyedia jasa yang lain. Hal tersebut, memberikan peluang bagi panitia (ULP) untuk bertindak tidak obyektif dalam proses pelelangan sehingga hanya akan menguntungkan sekelompok penyedia jasa saja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa permasalahan yang sering terjadi bagi penyedia jasa adalah dokumen penawaran yang di *upload* tidak dapat terbaca dalam program Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen) LPSE.

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
CV. ZAFIRAH	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. PALINDO	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
Neni Triani	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. SHALJU	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. DIAGRAM CREMONA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
PT. ELINDA KRIDA PRATAMA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. TOTAL KARYA TAMA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. Haraka Muhandis	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
SIAGA MEMBANGUN	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. BIRU	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. METROPOLITAN PALU	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. SINAR PUTRA CENDANA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ARYA TOVEAKU	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. RIA PRATAMA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. TOLAREINDO	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
cv. rezky arnas mandiri	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. PANDAWA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ARINA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. BINA GRAHA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ALIF HIDAYAH MANDIRI	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
PEMBANGUNAN PALU JAYA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. DARMAWAN	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
cv. nuril giyon pratama	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. TRI KARYA MUDA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
BAHANA AFTHA CONSTRUCTION	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
cv. star perdana	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ARUN LAKSANA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. KITA LOKO	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. Rajawali Junior Perkasa	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
cv. mega buana perkasa	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ASEAN	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. ARINDY PURA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. LEO PUTRA PERDANA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. BINA MUDA UTAMA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
PT. SUJAINCO (Suburo Jayana Indah Corp.)	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
PT. DWI KRIDA SEMPANA	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
cv.indah lestari	Rp 0,00	Rp 0,00	Tidak Memasukan Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
CV. TOTAL SULTENG JAYA	Rp 2.068.320.000,00	Rp 2.107.602.000,00	
CV. PAKARENA	Rp 2.197.870.000,00	Rp 2.197.893.000,00	
CV. CENDANA	Rp 2.236.645.000,00	Rp 2.281.078.000,00	

Gambar 1. Implementasi Proses Lelang LPSE UNTAD  
 Sumber: <http://lpse.untad.ac.id/eproc>, 2012

Kelemahan yang lain pada aplikasi LPSE, yaitu file dokumen penawaran yang di zip sebelum dilakukannya bundel file dengan program Apendo file kadang tidak terbaca.

- (4) Hardware  
 Ketersediaan infrastruktur dasar belum sepenuhnya mampu melayani tingkat kebutuhan penyedia jasa dan pengguna jasa (panitia pengadaan), seperti untuk membentuk LPSE, LKPP belum pernah menerapkan standar minimal untuk server yang dipakai, sehingga setiap daerah memiliki server yang beragam baik dari merk maupun spesifikasi. Bagi pengelola

LPSE yang tahu mengenai IT mungkin akan mudah dalam memilih server tapi bagi yang tidak tahu mengenai IT akan sulit, serta kemampuan jaringan komunikasi digital masih sering mengalami gangguan sehingga sangat menyulitkan penyedia jasa maupun panitia pelelangan/unit layanan pengadaan (ULP) Demikian juga dengan bandwidth sering menjadi kendala. Hal tersebut akibat dari LKPP tidak menerapkan standar minimal bandwidth yang harus dimiliki oleh setiap LPSE untuk menjalankan aplikasi SPSE dengan lancar.

Begitupun juga dengan kesiapan penyedia jasa, seperti terjadi permasalahan bagi penyedia jasa konstruksi untuk kontraktor skala kecil memiliki keterbatasan sarana penunjang, seperti perangkat internet akses.

(5) Data Penunjang

Pada proses pengadaan kelemahan pada data-data penunjang, seperti kelengkapan brosur peralatan dan material dan standar spesifikasi yang dimiliki penyedia jasa dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan penilaian teknis, beberapa penyedia jasa tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kelengkapan brosur dan standar spesifikasi yang dipersyaratkan, tentunya hal ini mengurangi kemungkinan menjadi pemenang dalam proses pelelangan yang diikuti.

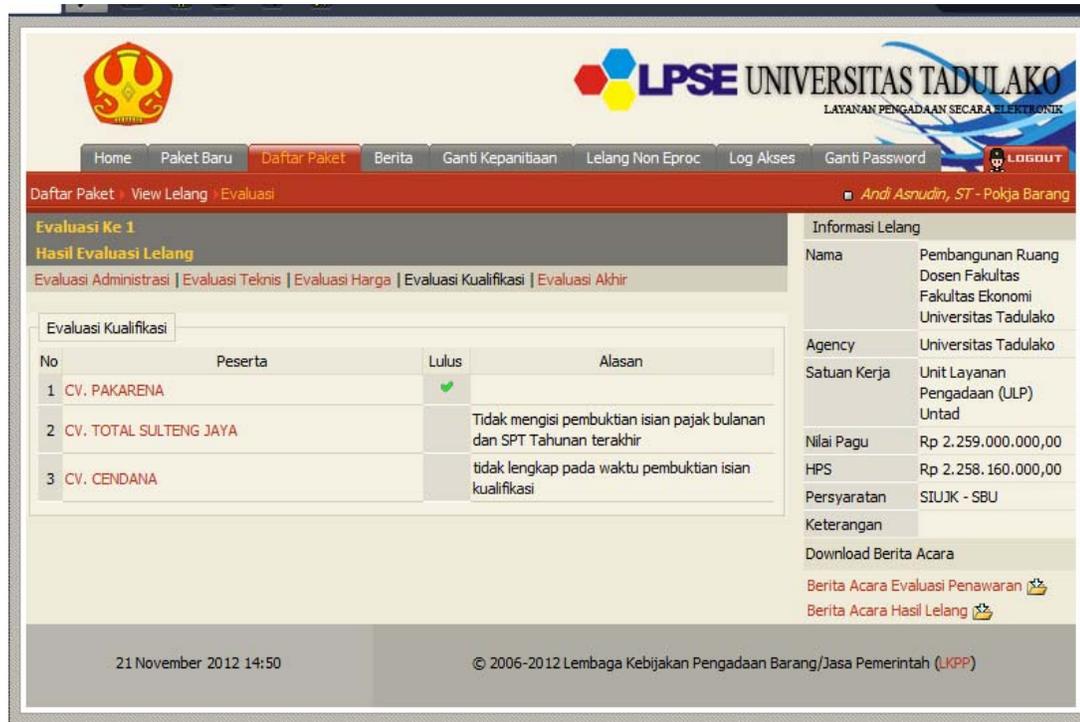
b. Faktor-Faktor Menggugurkan Penyedia Jasa

Beberapa faktor penyebab kontraktor dinyatakan gugur pada tahap pelelangan, antara lain.

(1) Unsur Administrasi

Penilaian unsur administrasi, yaitu penilaian syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan yang memenuhi akan dilanjutkan ke evaluasi teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominan penyedia jasa gugur pada tahapan seleksi diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) tingkat ketelitian kerja yang rendah (pada saat upload dokumen), (2) interpretasi keliru terhadap persyaratan pada lembar dokumen pelelangan (LDP), (3) rendahnya tingkat kesiapan untuk mengikuti pelelangan (kelengkapan data dan informasi), (4) kualitas administrasi yang buruk.



Gambar 2. Tampilan Hasil Evaluasi Administrasi  
 Sumber: <http://lpse.untad.ac.id/eproc>, 2012

(2) Unsur Teknis

Faktor teknis mencakup metode pelaksanaan/kerja, perencanaan penjadwalan (pekerjaan, material, tenaga kerja dan peralatan), spesifikasi teknis, kemampuan tenaga teknis dan peralatan.

Kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi beberapa persyaratan teknis dianggap menjadi hambatan, terutama bagi penyedia jasa dalam kategori skala kecil dan menengah.

Persyaratan teknis yang dianggap menyulitkan, antara lain seperti (1) kuantitas dan kualitas tenaga ahli yang dipersyaratkan, (2) metode kerja, dan (3) ketersediaan peralatan dan tenaga kerja, (4) rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa dominan penyedia jasa tidak memiliki kemampuan dalam membuat metode pelaksanaan pekerjaan, pembuatan perencanaan dan pengendalian jadwal pekerjaan.

(3) Unsur Biaya

Proses penilaian unsur biaya ditekankan pada kewajaran harga yang ditawarkan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam LDP.

Penilaian biaya mencakup koreksi aritmatik, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan dan upah kerja, serta preference harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan kewajaran harga yang ditawarkan.

Penelitian menunjukkan bahwa ketelitian estimator yang dimiliki oleh penyedia jasa sangat rendah, seperti perhitungan volume pekerjaan lebih besar dari volume yang ada pada dokumen lelang sehingga menyebabkan nilai penawaran melebihi HPS. Aplikasi SPSE secara otomatis akan memberikan tanda pada perusahaan yang penawaran biaya melewati nilai HPS.

## 5. Rekomendasi

Berbagai faktor perlu menjadi perhatian dalam pengembangan dan peningkatan layanan pengadaan secara elektronik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kemajuan teknologi dan informasi di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut.

- a) Peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk semua pihak terkait, yang dapat dilaksanakan melalui, pelatihan secara berkala, training.
- b) Dibentuk forum diskusi dengan pelibatan semua pihak terkait, yang dilaksanakan secara rutin.
- c) Ketersediaan dan peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan (*sustainable*) untuk menunjang sistem pengadaan secara elektronik yang efektif dan efisien, transparan, serta *accountable*.
- d) Aplikasi (software) yang digunakan memungkinkan semua pihak dapat mengakses dokumen-dokumen penyedia jasa untuk melihat kelengkapan yang telah di *up load* sebagai upaya proses pengadaan yang transparan dan kompetitif sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi penyedia jasa untuk bersaing secara luas (kompetitif).

## 6. Daftar Pustaka

- Asnudin, Andi., 2004, "Tinjauan Proses Pengadaan kontraktor skala kecil dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perdesaan", Institut Teknologi Bandung-Bandung.
- Asnudin Andi, 2005, "Konsep Pengembangan Kontraktor Skala Kecil", Jurnal SMARTEK. Vol.4.No.2, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu.
- Bentall P.H, November 2001. "Small Scale Contracting For Infrastructure Works In Vietnam", Socialist Republic Vietnam, International Labour Organization, Hanoi.
- <http://www.lkpp.go.id/v2/content.php>, Oktober, 2012.
- <http://lpse.untad.ac.id/eproc>, Oktober, 2012.
- Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.